

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya yang tidak terhingga sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan.

Sesuai Amanat Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program kegiatan selama satu tahun anggaran dalam rangka evaluasi capaian kinerja dengan melakukan perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tahun bersangkutan.

Kami sadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu segala saran dan kritikan yang konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk perbaikan pada masa akan datang. Terima kasih.

Masamba, Februari 2018

KEPALA DINAS

Drs. YASIR TABA, M.Kes, Apt

PKT : PEMBINA Tk.I

NIP : 19621221 199302 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB ini dibuat untuk memberikan gambaran capaian kinerja untuk tahun 2017.

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2017 telah melaksanakan 4 program yaitu :

1. Program Keluarga Berencana
2. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
4. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Capaian Target Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk Program Keluarga Berencana target kinerjanya pada umumnya telah dapat diselesaikan dengan baik, walaupun tidak sepenuhnya dapat terlaksana secara optimal.
2. Untuk Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri pada umumnya telah terlaksana dengan baik, namun demikian khusus untuk rasio Prasejahtera dan Prasejahtera I kurang Optimal karena belum terjangkaunya pelayanan KB terpencil dan pesisir, bagi keluarga Prasejahtera dan Prasejahtera I.
3. Untuk program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR target kinerjanya berjalan secara optimal melalui Program GenRe dengan membentuk Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Jalur Pendidikan dan Jalur Masyarakat. Pada Pik Remaja Jalur Pendidikan telah terbentuk 41 (Empat Puluh Satu) Kelompok/Sekolah yang terdiri dari 15 (Lima Belas) Tingkat SLTA, dan 25 (Dua Puluh Lima) tingkat SLTP dan 1 (Satu) Perguruan Tinggi. Beberapa prestasi yang telah diperoleh PIK Remaja pada tahun 2017 yaitu Juara III pada Ajang Temu Terampil dan Aksi Kreasi PIK Remaja dan Saka Kencana, dan Juara III Pemiliha Duta GenRe se-Sulawesi Selatan.

4. Untuk Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga target Kinerjanya berjalan secara optimal dan telah melebihi target.

Masamba, Februari 2018

KEPALA DINAS,

Drs. YASIR TABA, M.Kes, Apt

PKT : PEMBINA Tk.I/IVb

NIP : 19621221 199302 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 2 |
| DAFTAR ISI | 4 |
| BAB I PENDAHULUAN | 5 |
| 1. LATAR BELAKANG | 5 |
| 2. MAKSUD DAN TUJUAN | 5 |
| 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI | 6 |
| 4. STRUKTUR ORGANISASI | 7 |
| 5. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA | 9 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 14 |
| 1. PERENCANAAN STRATEGIS | 14 |
| 2. PENETAPAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA | 17 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 19 |
| 1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 19 |
| 2. PENGUKURAN KINERJA DAN ANALISISNYA | 21 |
| 3. REALISASI ANGGARAN | 34 |
| BAB IV PENUTUP | 36 |
| 1. KESIMPULAN | 36 |
| 2. SARAN | 36 |
| LAMPIRAN | |

**BAB
SATU**

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan Penetapan Kinerja sesuai dengan Permen PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara adalah untuk memberikan gambaran tentang pertanggung jawaban

atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara

b. Tujuan

- Untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan target yang telah ditulis sebelumnya.
- Untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2017

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 41) serta Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang uraian Tugas Pokok dan fungsi organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

➤ **Tugas Pokok**

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai Tugas Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang menjadi tanggung jawab dan Kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

➤ **Fungsi**

Untuk Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Tugas Pokok, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

4. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta keputusan Bupati Luwu Utara, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris yang membawai dua sub bagian, meliputi:

- a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

c. Kepala bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan:

- a) Seksi Advokasi dan Pergerakan.
- b) Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB
- c) Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga

d. Kepala Bidang Keluarga Berencana terdiri atas:

- a) Seksi Pengendalian dan Distribusi Alokasi
- b) Seksi Jaminan pelayanan KB
- c) Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB

e. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:

- a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- b) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia
- c) Seksi Ketahanan Keluarga

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan KTU

a) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur berikut ini : (terlampir).

5. Sumber Daya Manusia dan Sarana

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 sebanyak 84 Orang. Keadaan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 1.

Keadaan Pegawai Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan status pegawai dan tingkat pendidikan tahun 2017

| No | Tingkat Pendidikan | PNS | | Jumlah |
|--------|-----------------------|-----|----|--------|
| | | L | P | |
| 1 | Master (S2) | 1 | | 1 |
| 2 | Sarjana (SI) | 19 | 36 | 55 |
| 3 | Diploma (D4/D3/D2/D1) | 4 | 0 | 4 |
| 4 | SLTA | 10 | 14 | 24 |
| 5 | SMP | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 34 | 50 | 84 |

Tabel 2. Keadaan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara berdasarkan jabatan Struktural tahun 2017

| No | Jabatan | Jumlah | | Jumlah |
|--------|------------|--------|----|--------|
| | | L | P | |
| 1 | Eselon II | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Eselon III | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Eselon IV | 13 | 20 | 33 |
| 4 | Eselon V | - | - | - |
| JUMLAH | | 15 | 23 | 38 |

Tabel 3. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan.

| No | Jabatan | Jumlah | | Jumlah |
|--------|-----------------------|--------|----|--------|
| | | L | P | |
| 1 | Master (S2) | 1 | - | 1 |
| 2 | Sarjana (SI) | 18 | 39 | 57 |
| 3 | Diploma (D4/D3/D2/D1) | 0 | 2 | 2 |
| 4 | SLTA | 10 | 14 | 24 |
| 5 | SMP | | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 29 | 55 | 84 |

Tabel. 4 Keadaan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara berdasarkan pangkat dan Golongan Tahun 2017.

| No | Jabatan | Jumlah |
|----|--------------------------------|--------|
| 1 | Golongan IV | |
| | a) Pembina Utama (IV/ b) | 1 |
| | b) Pembina (IV/ a) | 4 |
| 2 | Golongan III | |
| | a) Penata Tk. I (III/ d) | 20 |
| | b) Penata (III/ c) | 10 |
| | c) Penata Muda Tk. I (III/ b) | 15 |
| | d) Penata Muda (III/ a) | 17 |
| 3 | Golongan II | |
| | a) Penata Tk. I (II/ d) | 1 |
| | b) Pengatur (II/ c) | 6 |
| | c) Pengatur Muda Tk. I (II/ b) | 6 |
| | d) Pengatur Muda (II/ a) | 4 |
| | | |
| | | |
| | JUMLAH | 84 |

b. Sarana dan Prasarana

Tabel. 5 Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas PP dan KB Kab.Luwu Utara Tahun 2017

adalah sebagai berikut:

| | | | |
|----|---|---------------------------|-------------|
| 1 | Gedung Kantor | 1 Unit | Baik |
| 2 | Kantor UPTB | 12 Unit | Baik |
| 3 | Printer | 23 Unit | Baik |
| 4 | Laptop | 4 Buah | Baik |
| 5 | Note Book | 10 Set | Baik |
| 6 | In Fokus (Proyektor) | 2 Set (Layar & Proyektor) | Baik |
| 7 | Wireless | 1 Buah | Baik |
| 8 | Kursi Futura (Susun) | 200 Buah | Baik |
| 9 | Lemari Arsip 3 Pintu | 2 Buah | Baik |
| 10 | Lemari Arsip Pintu Kaca | 2 Buah | Baik |
| 11 | Lemari Arsip | 19 Buah | Baik |
| 12 | Lemari Penyimpanan | 7 Buah | Baik |
| 13 | Mesin Ketik | 3 Buah | Baik |
| 14 | Rak Kayu | 13 Buah | Baik |
| 15 | Brankas | 1 Buah | Baik |
| 16 | Lemari Makan | 1 Buah | Baik |
| 17 | Kursi Tamu | 6 Set | Baik |
| 18 | Meja ½ Biro | 34 Buah | Baik |
| 19 | AC | 10 Buah | Baik |
| 20 | Kipas Angin | 30 Buah | Baik |
| 21 | TV | 2 | 1Baik/ 1Rus |
| 22 | Dispenser | 1 Buah | Rusak |
| 23 | Meja dan Kursi 1 Biro | 12 Buah | Baik |
| 24 | Kursi ½ Biro | 11 Buah | Baik |
| 25 | Kendaraan Roda 2 (Penyuluh KB) | 88 Buah | Baik |
| 26 | Kendaraan Roda Empat Mobil Unit Pelayanan KB | 1 Buah | Baik |
| 27 | Kendaraan Roda Empat Mobil Unit Penerangan KB (Mupen) | 1 Buah | Baik |
| | | | |

| | | | |
|----|---------------------------|--------|------|
| 37 | Troli Barang | 1 Buah | Baik |
| 38 | Tangga Aluminium | 1 Buah | Baik |
| 39 | Pallot | 5 Buah | Baik |
| 40 | Media Advokasi Video Tron | 1 Buah | Baik |
| 41 | Tugu KB | 1 Unit | Baik |
| 42 | Camera | 1 Unit | Baik |
| 43 | CCTV | 1 Set | Baik |
| 44 | Genre kit | 22 set | Baik |
| 45 | PLKB/PKB Kit | 23 set | Baik |
| 46 | Desk book | 6 Buah | Baik |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Adapun Permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur, PKB, PLKB dan Institusi masyarakat pedesaan (PPKBD, SUB PPKBD, BKB, BLK, UPPKS dan Posyandu) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Kurangnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana dibandingkan dengan luas wilayah kerja
- c. Target penurunan jumlah keluarga prasejahtera setiap tahun.
- d. Pemenuhan kebutuhan kelompok kesehatan reproduksi remaja bagi remaja diluar sekolah.
- e. Belum maksimalnya layanan KB diwilayah terpencil dan tertinggal.
- f. Target pelayanan akseptor KB bagi pasangan usia subur.
- g. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat pada program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Utara.
- h. Terbatasnya akses informasi dan pengetahuan remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi.
- i. Tingginya jumlah pernikahan dini di Kabupaten Luwu Utara.

**BAB
DUA****PERENCANAAN KINERJA****1. Perencanaan Strategis (Renstra)**

Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada RPJMD Kab. Luwu Utara 2016 – 2021,

RPJMD KAB. LUWU UTARA 2016 – 2021

RPJMD 2016 – 2021 ditujukan untuk lebih memantapkan penetapan pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya dan mengatasi permasalahan di Kab. Luwu Utara terutama masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

Berkaitan dengan ini telah ditetapkan Visi Kab. Luwu Utara yaitu ***“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang berlandaskan Kearifan Lokal”*** Visi tersebut mengandung makna bahwa :

“Luwu Utara Yang Religius” dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara

“Pembangunan Berkualitas dan Merata”, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan Pembangunan yang lebih merata dan diseluruh wilayah kecamatan.

“Berdasarkan Kearifan Lokal”, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan nilai-nilai *kebijakan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.*

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

1. Mewujudkan masyarakat yang religius dan tata kelola pemerintahan yang baik dan komunitas adat yang berdaya;
2. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, kelestarian lingkungan hidup dan pemenuhan rumah layak huni;
3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, Prestasi Kepemudaan, Ketahanan Budaya;
4. Mewujudkan kemandirian Ekonomi, Iklim Investasi dan daya tarik wisata
5. Mewujudkan Penurunan Ketimpangan Pendapatan dan Pembangunan Infrastruktur wilayah;
6. Mewujudkan Penurunan Ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
7. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran Pembangunan Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 yang berhubungan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB adalah misi ke dua yaitu : Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.

2. RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2016 – 2021

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara maka setiap SKPD wajib menyusun Renstra dengan mengaju kepada Renstra RPJMD dan Renstra Kabupaten.

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran).

A. VISI

Berdasarkan Visi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara merumuskan Visi sbb:

“Terwujudnya Keluarga Sejahtera dan Berkualitas “.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi sbb :

1. Mewujudkan Keluarga Kecil dan Berkualitas;
2. Mewujudkan Keluarga Sejahtera;

C. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Utara, ditetapkan Tujuan dan Sasaran :

| No. | Tujuan | Sasaran |
|-----|--|---|
| 1. | Mewujudkan kualitas keluarga kecil dan Sejahtera | <ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan kualitas keluarga kecil dan sejahtera |
| 2. | Mewujudkan Keluarga Sejahtera | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya pembinaan keluarga yang ideal yang sehat dan sejahtera dan meningkatnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri |

2. PENETAPAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Adapun Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel. 6 Adapun Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2017 adalah sebagai berikut

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|--------|
| 1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan Berorientasi public | Laporan Keuangan Tepat Waktu sesuai SAP | Tepat |
| 2. Terwujudnya Laporan Kinerja Administrasi Pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh public | Status laporan kinerja kategori baik | B |
| 3. Meningkatnya Kualitas Keluarga Kecil dan sejahtera | 1. Persentase laju pertumbuhan penduduk | 1,45 |
| | 2. Rata-rata jumlah anak perkeluarga | 2 |
| | 3. Rasio Akseptor KB | 17 % |
| | 4. Cakupan Peserta KB aktif | 67 % |
| | 5. Cakupan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I | 15 % |
| | 6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di Bawah Usia 20 tahun | 3,8% |
| | 7. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif | 85 % |
| | 8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | 28 % |
| | 9. Cakupan PUS yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) | 15 % |
| | 10. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro keluarga di setiap Desa | 100% |
| 4. Meningkatkan Pembinaan Keluarga yang Ideal sehat dan kesejahteraan dan meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri | 11. Ratio Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB) | 1/2 |

| | | |
|--|--|------|
| | 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan | |
| | 12. Ratio Petugas Pembantu Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa kelurahan 1 PPKBD | 1/1 |
| | 13. Cakupan anggota Kelompok Bina Keluarga (BKB) ber KB | 85% |
| | 14. Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | 30 % |

Untuk mencapai target kinerja tersebut di atas, dilakukan berbagai macam program dan kegiatan sbb:

1. Program keluarga berencana

- a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin
- b. Pembinaan Keluarga Berencana
- c. Pengadaan sarana mobilitas Tim KB Keliling

2. Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

- a. Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat KB peduli
- b. Koordianasi Pengolahan Program
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

4. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Adapun Tabel Penetapan Kinerja dapat dilihat pada lampiran

BAB TIGA

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu Utara. Dimana penetapan kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya untuk mengetahui celah kinerja. Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pada tahun 2017 ini merupakan tahun kedua Pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021 yang dijabarkan ke dalam renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Untuk mengetahui sebagaimana akuntabilitas kinerja kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun Tahun 2017 di sajikan dalam capaian indikator Kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi tahun ini serta realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional melalui indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya sebagai berikut:

Analisis Pencapaian indikator Kinerja

Analisis Pencapaian Kinerja dilakukan berdasarkan Pengukuran Kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran. Analisis Pencapaian Kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 7 Perbandingan Target Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun | | | | |
|----|--|---|-------|------|------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas keluarga kecil dan Sejahtera | Persentase laju pertumbuhan penduduk | 1,50 | 1,45 | 1,30 | 1,25 | 1,20 |
| | | Rata-rata jumlah anak perkeluarga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Rasio akseptor KB | 15 | 15 | 15 | 15,5 | 16 |
| | | Cakupan Peserta KB Aktif | 66 | 67 | 68 | 69 | 72 |
| | | Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera | 18 | 15 | 14 | 13 | 10 |
| | | Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah 20 Tahun | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 |
| | | Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| | | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 2 | Meningkatnya peran serta | Cakupan Penyediaan informasi data mikro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| masyarakat dalam Pelayanan KB yang mandiri | keluarga disetiap desa/kelurahan | | | | | |
| | Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKBPKB) | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| | Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| | Cakupan anggota bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 83 | 85 | 87 | 90 | 95 |
| | Cakupan PUS Peserta KB anggota usaha Peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

2. Pengukuran Kinerja dan Analisisnya

Pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja nyata yang terkendala oleh beberapa hal antara lain belum optimalnya perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja serta beberapa indikator belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat.

Gambaran keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam mencapai tujuan dan sasaran dipresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minima (SPM) akan tetapi perolehan capaian indikator kinerja terhadap 2 sasaran selama tahun 2017 cukup variatif dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan prestasi capaian sangat rendah.

Berikut ini perolehan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2017 beserta evaluasi beserta analisis capaiannya :

- a. **Pencapaian realisasi antara target dan realisasi kinerja tahun ini**
- b. **Sasaran I. Meningkatnya Keluarga Kecil dan Sejahtera**

Berikut penyajian tabel untuk melihat lebih jauh capaian persasaran dari misi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

- c. **Tabel 8.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Keluarga Kecil dan Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Utara Tahun 2017**

| Sasaran I | | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|---------------|------------------|----------------|
| Uraian | Indikator Kinerja | | | |
| Meningkatnya Kualitas Keluarga Kecil dan Sejahtera | Persentase laju pertumbuhan penduduk | 1.45 | 0.89 | 100 |
| | Rata-rata jumlah anak perkeluarga | 2 | 2 | 100 |
| | Rasio akseptor KB | 17 | 9,78 | 57,52 |
| | Cakupan Peserta KB Aktif | 67 | 74,40 | 100 |
| | Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera | 15 | 18,22 | 83,33 |
| | Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah 20 Tahun | 3,8 | 2,95 | 100 |
| | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 85 | 74,40 | 87,52 |
| | Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | 28 | 24 | 85 |
| | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) | 15 | 25,60 | 60 |

Pencapaian Sasaran I :

Meningkatnya kualitas keluarga kecil dan sejahtera yang merupakan salah satu sasaran dari misi ke dua RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021

terus menerus diupayakan dalam rangka mewujudkan kualitas keluarga kecil dan sejahtera dalam pencapaian sasaran strategis nasional.

Dari sasaran Meningkatnya kualitas keluarga kecil dan sejahtera terlihat dari 9 (sembilan) indikator kinerja ,yang memenuhi kriteria baik hanya 7 (Tujuh) indikator dimana 4 (Empat) indikator yaitu persentase laju pertumbuhan penduduk , rata-rata jumlah anak perkeluarga, cakupan peserta KB aktif dan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 tahun dimana rata-rata realisasi pencapaian target diatas 100%. Untuk indikator rasio akseptor KB dan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) masih dibawah pencapaian 65% hal ini disebabkan karena masih kurangnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana dibandingkan dengan luas wilayah dan belum tersentuhnya daerah pinggiran (calcilitas) hal ini terbukti sampai saat ini baru 46 tenaga penyuluh yang seharusnya 87 orang dimana seharusnya satu penyuluh membina dua desa.

- d. **Sasaran II.** Meningkatnya pembinaan keluarga ideal yang sehat dan sejahtera serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri.

Tabel 8.2 Pencapaian target dan realisasi kinerja meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB yang Mandiri

| Sasaran II | | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--|--------|-----------|---------|
| Uraian | Indikator Kinerja | | | |
| Meningkatnya pembinaan keluarga ideal yang sehat dan sejahtera | Cakupan Penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan | 100 | 100 | 100 |
| | Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) | 1:2 | 1:3 | 75 |

| | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|
| serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri | Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| | Cakupan anggota bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 85 | 85 | 100 |
| | Cakupan PUS Peserta KB anggota usaha Peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | 30 | 45 | 100 |

Pencapaian Sasaran II:

Pencapaian realisasi untuk Meningkatnya pembinaan keluarga ideal yang sehat dan sejahtera serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri, dari 5 (lima) indikator kinerja ada 4 (empat) indikator sudah cukup baik dimana rata-rata capaiannya diatas 100%. Untuk pencapaian sasaran indikator Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mengalami peningkatan yang cukup drastis ini disebabkan karena keluarga sejahtera merupakan keluarga yang tidak lagi memenuhi indikator keluarga prasejahtera sebagai manfaat dari kegiatan pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Untuk 1 (satu) indikator yaitu Ratio Pembantu Lapangan Keluarga Berencana Penyuluh Keluarga Berencana belum memenuhi target 1:2 dimana satu penyuluh membina dua desa ini dikarenakan kurangnya tenaga PNS yang ingin menjadi tenaga penyuluh dilapangan.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut penyajian tabel untuk melihat lebih jauh capaian meningkatnya kualitas keluarga kecil dan sejahtera

Tabel. 8.2 Perbandingan Antara capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

| No | Indikator Kinerja | Relisasi Capaian Tahun 2011-2017 | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Persentase laju pertumbuhan penduduk | | | | | 1,55 | 1,50 | 0.89 |
| 2 | Rata-rata jumlah anak perkeluarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Rasio akseptor KB | 8,10 | 8,28 | 8,50 | 8,81 | 9,46 | 10,5 | 9.78 |
| 4 | Cakupan Peserta KB Aktif | 73,15 | 73,26 | 73,46 | 73,54 | 73,86 | 73,90 | 74,40 |
| 5 | Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera | 40,26 | 30,95 | 20,40 | 20,02 | 19,04 | 17 | 18,22 |
| 6 | Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah 20 Tahun | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3,9 | 2,95 |
| 7 | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74,40 |
| 8 | Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
| 9 | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 25,60 |

Dari 9 (Sembilan) Indikator Kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas keluarga kecil dan sejahtera, 6 (Enam) diantaranya mengalami peningkatan realisasi pencapaian. Ini disebabkan karena tingkat pernikahan dini mengalami penurunan karena peningkatan jumlah PIK Remaja yang dibentuk di sekolah, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB dengan menggunakan alat kontrasepsi, dan masyarakat yang tidak ingin anak lagi dan ingin menunda anak telah memiliki kesadaran yang cukup baik untuk menjadi peserta KB. Mereka lebih memilih menunda anak dengan cara menggunakan alat kontrasepsi dari pada dengan cara alami atau tradisional.

Sedangkan 3 (Tiga) indikator kinerja yaitu Rasio akseptor KB, cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat serta keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I mengalami penurunan realisasi capaian disebabkan karena kurangnya dropping obat kontrasepsi dari BKKBN pusat dan pelarangan pengadaan alat kontrasepsi di daerah karena tahun 2017 pengadaan alat kontrasepsi sudah kewenangan pusat untuk pengadaannya.

Berikut penyajian tabel untuk melihat lebih jauh capaian meningkatnya pembinaan keluarga ideal yang sehat dan sejahtera serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri

Tabel 8.3 perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| No | Indikator Kinerja | Relisasi Capaian Tahun 2011-2017 | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 |
| 3 | Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 4 | Cakupan anggota bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 71 | 71 | 71 | 93 | 80 | 85 | 85,95 |
| 5 | Cakupan PUS Peserta KB anggota usaha Peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 45 |

Dari 5 (lima) indikator kinerja pada sasaran meningkatnya pembinaan keluarga ideal yang sehat dan sejahtera serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri, 5

(Lima) diantaranya mengalami peningkatan realisasi pencapaian. Ini disebabkan karena peningkatan jumlah anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Peningkatan jumlah anggota Peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang ikut KB, Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD), Peningkatan jumlah tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dan Peningkatan jumlah anggota Penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan..

c. Perbandingan kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel. 9 Perbandingan kinerja Dinas pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kab. Luwu Utara tahun 2016 – 2021

| No | Indikator Kinerja | Target Kinerja Sampai Akhir RPJMD | Realisasi sampai dengan Tahun ini | % Capaian |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | Presentase laju pertumbuhan penduduk | 1,20 | 0,89 | 100 |
| | Rata – rata jumlah anak Perkeluarga | 2 Anak | 2 Anak | 100 |
| | Rasio Akseptor KB | 16 | 9,78 | 61,12 |
| | Cakupan Peserta KB Aktif | 72 | 74,40 | 103 |
| | Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera | 10 | 18,22 | 55,55 |
| | Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah 20 Tahun | 3,40 | 2,95 | 115 |
| | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 75 | 74,40 | 92,2 |
| | Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | 30 | 28 | 93,33 |
| 2 | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) | 12 | 25,60 | 48 |
| | Cakupan Penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan | 100 | 100 | 100 |

| | | | |
|--|-----|-------|-------|
| Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) | 1:2 | 1:3 | 75 |
| Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) | 1:1 | 1:1 | 100 |
| Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB | 95 | 85,95 | 90,52 |
| Cakupan PUS Peserta KB anggota usaha Peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | 60 | 45 | 75 |

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator lainnya yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebanyak 14, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteri sebagai berikut :

| No | Kondisi | Jumlah Target Indikator | Jumlah Indikator | % |
|----|--|-------------------------|------------------|-------|
| 1 | Sangat memuaskan (capaian diatas 100 persen) | 14 | 5 | 16,12 |
| 2 | Memuaskan (capaian diatas 90 persen – 100 persen) | 14 | 2 | 3,22 |
| 3 | Cukup Memuaskan (capaian diatas 60 persen-90 persen) | 14 | 21 | 67,74 |
| 4 | Kurang Memuaskan (capaian 25 persen-90 persen) | 14 | 2 | 6,45 |
| 5 | Tidak Memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) | 14 | 1 | 3,22 |

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara, maka indikator kinerja tersebut sebagian besar sudah mencapai target jangka menengah.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yaitu pada semua target indikator SPM :

Tabel. 10 Perbandingan Tingkat Realisasi pada semua Target Indikator SPM dengan Realisasi Kinerja Tahun ini

| No | Jenis Indikator | Target Kabupaten | Tingkat Nasional |
|----|--|------------------|-----------------------------|
| 1 | Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah 20 Tahun | 3,8 | 3,5 |
| 2 | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 85 | 65 |
| 3 | Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | 28 | 30 |
| 4 | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) | 15 | 5 |
| 5 | Cakupan Penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan | 100 | 100 |
| 6 | Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) | 1:2 | 1:2 (1 PLKB membina 2 Desa) |
| 7 | Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) | 1:1 | 1:1 (1 PPKBD untuk 1 Dea) |
| 8 | Cakupan anggota Bna Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 85 | 70 |
| 9 | Cakupan PUS Peserta KB anggota usaha Peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | 30 | 87 |

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dari 9 (Sembilan) indikator SPM yang ada baru 5 (Lima) indikator yang sudah memenuhi SPM, 4 (Empat) Indikator

lainnya belum terpenuhi. Ini berarti target realisasi kinerja tahun ini masih rata-rata dibawa target SPM.

Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

Pencapaian keberhasilan kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga Kecil dan Sejahtera, Meningkatnya Pembinaan Keluarga yang Ideal yang sehat dan Sejahtera serta Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB yang Mandiri sangat ditentukan oleh dukungan dana, ketersediaan aparat teknis dan non teknis, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

Adapun keberhasilan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB antara lain :

- Telah terbentuknya 13 Kampung KB di 12 Kecamatan
- Telah tersedianya Media Penyampaian Informasi KIE (Tugu KB)
- Telah tersedianya Mobil Box distribusi Alokon
- Telah Terbentuknya 41 Kelompok PIK Remaja Tingkat SLTA dan SLTP se Kab. Luwu Utara dan 1 Perguruan tinggi
- Telah terbentuknya Bina Keluarga Balita (BKB) 30 Kelompok, Bina Keluarga Lansia (BKL) 9 Kelompok dan Bina Keluarga Remaja (BKR) 9 Kelompok.

Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut lebih banyak menyangkut lemahnya koordinasi dan pemahaman yang berbeda pada berbagai tingkatan, masih kurangnya tenaga penyuluh di lapangan, dan kondisi geografis serta daerah calcilitas.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan menyederhanakan jalur koordinasi secara vertikal maupun horizontal agar program pelaksanaan kegiatan bisa berjalan efektif, peningkatan SDM dan penambahan tenaga penyuluh di lapangan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan Kinerja/perjanjian kinerja tahun 2017 sebesar Rp. 3.810.000.000,- dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp. 4.065.000.000,- tambahan anggaran ini berasal dari Dana APBD dan DAK. Tambahan Bidang KB tahun 2017 sebesar Rp. 1.762.760.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.538.134.845,- atau 94,58%

Tabel. 11 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Serapan Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Keterangan |
|----|---|---------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas Keluarga Kecil dan sejahtera | 1.147.498.300 | 627.250.500 | 54,67 | 89,57 | Efisien |
| 2 | Meningkatnya Pembinaan Keluarga yang ideal yang Sehat dan Sejahtera serta meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB yang Mandiri | 1.011.041.700 | 1.010.942.650 | 99,99 | 99,99 | Sangat Efisien |

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sumber daya manusia yang ada sebanyak 84 orang dengan terbatasnya sumber daya manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut diupayakan untuk

memanfaatkan SDM organisasi yang ada serta mengoptimalkan pembagian seluruh staf yang ada ,

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dilakukan beberapa program dan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 :

- Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan :
 1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
 2. Pembinaan Keluarga Berencana
 3. Pengadaan Sarana Mobillitas Tim KB keliling
- Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, dengan kegiatan:
 1. Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
 2. Koordinasi Pengolahan Program
 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Program pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, dengan Kegiatan
 1. Pembinaan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

dengan kegiatan :

1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Adapun yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

- Adanya komitmen untuk maju dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi
- Tersedianya Anggaran
- Tersusunnya program dan kegiatan yang jelas
- Adanya dana perimbangan dari BKKBN pusat

Adapun yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

- Terbatasnya Jumlah SDM pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
- Masih lemahnya sikap kreatif dan inovatif Staf
- Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung operasional Pelayanan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
- kondisi geografis serta daerah calcilintas

3. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB untuk Tahun Anggaran

2017 sebesar Rp 9.935.595.000 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 5.870.595.000 | 5.859.355.408 | 99,81 |
| | Belanja Pegawai | 5.870.595.000 | 5.859.355.408 | 99,81 |
| 2 | Belanja Langsung | 4.065.000.000 | 3.538.134.845 | 87,04 |
| | Belanja Pegawai | 253.450.000 | 253.450.000 | 100 |
| | Belanja Barang & jasa | 2.618.550.000 | 2.617.199.695 | 99,95 |
| | Belanja Modal | 1.193.000.000 | 667.485.150 | 55,95 |
| Jumlah | | 9.935.595.000 | 9.397.490.253 | 94,58 |

Realisasi Belanja Tidak Langsung dalam tahun anggaran 2017 sebesar Rp 5.859.355.408 (99,81%) Sedangkan Belanja Lansung Rp 3.538.134.845 (87,04%) belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan investasi antara lain: 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda empat , 4 (Empat) Unit kendaraan roda dua dan Sarana Pelayanan KB.

Berdasarkan analisis terhadap rincian kinerja yang dihubungkan dengan pembiayaan terhadap pencapaian target sasaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dari sisi belanja dapat dikatakan secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan dan ditampilkan pada tabel dibawah ini :

[illegible]

**BAB
EMPAT**

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun gagasan Capaian sasaran Strategis
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan berdasarkan pada Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang ditetapkan di RPJMB 2016- 2021, Renstra dan Penetapan Kinerja tahun 2017
- c. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB telah melaksanakan tugas Pokok dan fungsinya secara efektif, efisien dan akuntabel

2. Saran

Diperlukan Terobosan baru agar pelaksanaan Program menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme Penyusunan Program kerja/Anggaran sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat menurun, meningkatkan kualitas dan Kuantitas penduduk, pemerataan penduduk dan kualitas Pelayanan KB lebih maksimal.

Masamba, Februari 2018

KEPALA DINAS,

Drs. YASIR TABA, M.Kes, Apt

PKT : PEMBINA Tk.I

NIP : 19621221 199302 1 001